

Income Inequality of West Java Province and the Factors That Affect It

Sri Rahayu Ningsih¹ , Eni Setyowati, S.E., M.Si²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

 sriahayuningsih577@gamial.com

Abstract

Income inequality is one of the indicators to see the magnitude of the difference in economic growth in an area with the difference in existing resources making an area can be said to be advanced and underdeveloped, so it can lead to weakening of social stability, economic inefficiency and solidarity. West Java province is the province that has the fourth highest level of inequality out of seven provinces in 2020. This study aims to analyze the amount of income inequality in West Java province with several variables that have been selected, namely: minimum wage; open unemployment rate, poor population, government spending. The data source used comes from the Central Statistics Agency of West Java province. In this study using Theil entropy index analysis method and panel data regression. The model chosen in this study is the Fixed Effect Model (FEM) of the model is known that only the minimum wage open unemployment rate and the poor have a significant effect on income inequality in West Java province in 2017-2020.

Keywords: *Income Inequality; Minimum Wage; Open Unemployment Rate; Poor Population; Government Spending.*

Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

Abstrak

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu indikator untuk melihat besarnya perbedaan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dengan perbedaan sumber daya yang ada membuat suatu daerah dapat dikatakan maju dan tertinggal, sehingga dapat mengakibatkan melemahnya stabilitas sosial, inefisiensi ekonomi dan solidaritas. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi keempat dari tujuh provinsi pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat dengan beberapa variabel yang telah dipilih, yaitu: upah minimum; tingkat pengangguran terbuka, penduduk miskin, pengeluaran pemerintah. Sumber data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis indeks entropi Theil dan Regresi Data panel. Model yang dipilih dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM) dari model diketahui bahwa hanya upah minimum tingkat pengangguran terbuka dan penduduk miskin yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2020.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan; Upah Minimum; Tingkat Pengangguran Terbuka; Penduduk Miskin; Pengeluaran Pemerintah.

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu penanda adanya perbedaan jumlah pendapatan di suatu daerah sehingga dengan adanya perbedaan tersebut menyebabkan beberapa daerah dapat dikatakan maju dan tertinggal. Pembangunan ekonomi merupakan kunci besarnya kesenjangan antar wilayah yang ada dan beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya yang nantinya dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah guna memperbaiki perekonomian di daerah tersebut. Menurut Arif (2017), pembangunan ekonomi harus di pandang sebagai suatu proses saling berkaitan dan saling mempengaruhi antar faktor faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi untuk dapat dilihat dan di analisis baik secara nasional maupun regional.

Suatu pembangunan ekonomi merupakan usaha-usaha guna meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup, kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun, masih ada perbedaan yang sangat jelas berupa tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar daerah. Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017-2020 selalu masuk 7 besar Provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2020 Jawa Barat berada dalam peringkat empat, seperti pada tabel 1-1 dibawah ini.

Tabel 1
Peringkat 7 Besar Tingkat Ketimpangan Tertinggi di Indonesia Tahun 2020 Diukur Dengan Gini Ratio

Provinsi	Gini Ratio
Yogyakarta	0,437
Gorontalo	0,406
DKI Jakarta	0,400
Jawa Barat	0,398
Papua	0,395
Sulawesi Tenggara	0,388
NTB	0,386

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 1-1 menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam kategori provinsi dengan ketimpangan tertinggi. Ketimpangan pendapatan yang ada di tahun 2020 dilatar belakangi oleh dengan adanya Covid-19 . Turunya perekonomian Jawa Barat sejak triwulan 1 sebesar 2,73 persen hingga triwulan IV tahun 2020 sebesar 2,98 persen. Kinerja beberapa sektor mengalami penurunan sehingga menyebabkan rendahnya PDRB, sektor yang mencangkup adalah sektor listrik dan gas yang menurun sebesar 7,62 persen, perdagangan besar eceran, reparasi motor dan mobil turun sebesar 7,94 persen dan jasa perusahaan turun sebesar 18,38 persen.

Upah minimum merupakan salah satu indikator yang seringkali menjadi tolak ukur pembangunan ekonomi yang ada di daerah tersebut, ketika upah naik akan terjadi dua dampak yang sering terjadi. Dampak yang positif para pegawai memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat menjadi bekal untuk tabungan jangka panjang, namun dampak negatifnya perusahaan mempunyai beban untuk

meningkatkan biaya output yang dikeluarkan. Sehingga perusahaan akan mengurangi tenaga kerja untuk melakukan efisiensi. Menurut Sumarsono (2003), tingginya ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh tingkat upah minimum yang tinggi. Upah minimum yang tinggi akan mempengaruhi produksi perusahaan. Jika upah minimum naik maka biaya produksi dan harga barang di perusahaan meningkat yang mengakibatkan konsumen mengurangi konsumsi pada barang tersebut, sehingga produsen akan menurunkan jumlah produksi dan mengurangi tenaga kerja yang nantinya akan berakibat tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Setiap tahunnya terjadi peningkatan pengangguran terbuka yang sampai saat ini belum dapat tertangani, namun tidak selamanya pengangguran akan terus meningkat seperti di beberapa daerah terdapat penurunan pengangguran dengan usaha pemerintah mendirikan balai pelatihan kerja. Menurut (Sjafrizal, 2008), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah perbedaan kondisi demografis. Keadaan demografis seperti perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, dan perbedaan kondisi ketenagakerjaan termasuk didalamnya adalah tingkat pengangguran. Pemerintah berupaya menurunkan ketimpangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengimbangi adanya peningkatan pengangguran setiap tahunnya. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran dengan meningkatkan subsidi pendidikan dan kesehatan sehingga ketika masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan pemerintah berharap hal itu dapat menumbuhkan tenaga kerja yang produktif dan mempunyai daya kreatifitas yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai bagaimana pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, penduduk miskin, pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017-2020, dengan judul "Ketimpangan Pendapatan di Jawa Barat dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya" yang belum pernah diteliti sehingga menjadi masukan bagi pemerintah provinsi jawa barat dan Bappeda terkait ketimpangan pendapatan.

2. Metode

Ketimpangan pendapatan ini diukur dengan Indeks Entropy Theil yang berfungsi mengukur secara rinci sehingga ketika semakin mendekati angka 0 maka semakin rendah ketimpangan yang ada sehingga indeks entropy theil digunakan untuk variabel dependen.

Menurut Ying dalam Jurnal Mudrajad Kuncoro (2004), menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya disparitas pendapatan antar wilayah . Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Indeks Entropy Theil dengan rumus seperti berikut:

$$I_{Theil} = \sum \frac{y_j}{Y} * \log \left[\left(\frac{y_j}{Y} \right) / \left(\frac{x_j}{X} \right) \right]$$

Keterangan:

I Theil = Indeks Entropy Theil

y₁ = PDRB perkapital masing masing Kabupaten/Kota

Y = Rata-rata PDRB perkapital Provinsi Jawa Barat

X_j = Jumlah penduduk Kabupaten/Kota

X = Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat

Variabel yang akan digunakan untuk melihat besarnya pengaruh ketimpangan yaitu upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, Penduduk Miskin, pengeluaran pemerintah. Penelitian ini menggunakan Regresi data panel. Menurut Gujarati (2012), data panel merupakan gabungan data time series dan data cross section. Data time series adalah data dari satu objek dengan beberapa periode waktu tertentu, sedangkan data cross section merupakan data yang diperoleh dari satu maupun lebih objek penelitian dalam satu periode yang sama. Model ekonometrik sebagai berikut:

$$I\ Theil_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log UM_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 PM_{it} + \beta_4 \log G_{it} + \varepsilon_{it}$$

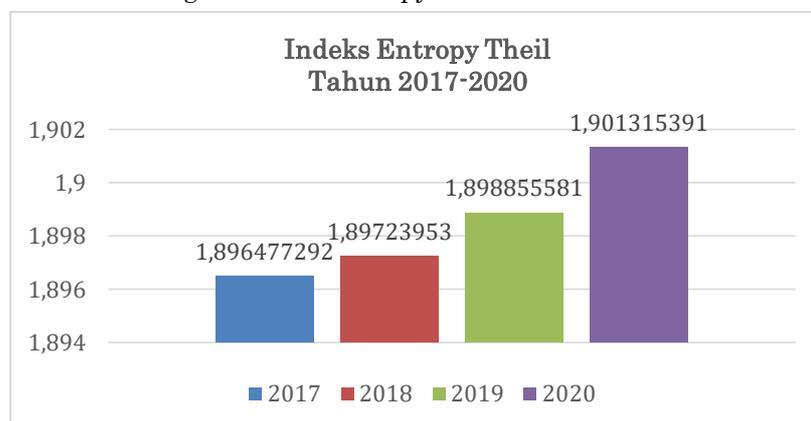
Keterangan:

I theil	= Indeks Entropy Theil (persen per tahun)
UM	= Upah Minimum (Rupiah per bulan)
TPT	= Tingkat Pengangguran Terbuka (persen per tahun)
PM	= Penduduk Miskin (Jiwa per tahun)
G	= Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah per tahun)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$	= Koefisien regresi variabel Independen
Log	= Operator logaritma berbasis e
i	= Observasi ke i
t	= Tahun ke t
ε	= Error term (Faktor kesalahan)

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya ketimpangan pendapatan yang terjadi menggunakan metode perhitungan indeks entropy theil. Indeks entropy theil yang semakin tinggi menunjukkan ketimpangan yang semakin besar, namun jika semakin kecil maka ketimpangan akan semakin rendah/kecil atau semakin merata. Penelitian ini difokuskan untuk mengamati pada kurun waktu 2017 hingga 2020 yaitu menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat sebesar 1,90. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan dalam kategori tinggi. Perkembangan Indeks Entropy Theil di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Grafik 1 berikut:

Gambar 1
Perkembangan Indeks Entropy Theil di Provinsi Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, data diolah

Grafik 1 menunjukkan bahwa indeks entropy theil di Provinsi Jawa Barat semakin tahun menjadi meningkat sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan

dapat dikatakan cenderung meningkat. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,901 di dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini di akibatkan adanya Covid-19 sehingga perekonomian di Provinsi Jawa Barat menurun. Peningkatan yang ada di Jawa Barat cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding dengan pedesaan. Hal ini menjadi suatu hal yang harus menjadi perhatian pemerintah supaya hal tersebut tidak berlanjut di tahun berikutnya.

3.1. Hasil Pemilihan Model Terbaik

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel. Terdapat beberapa metode regresi data panel yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Terdapat tahap pengujian untuk memperoleh model terbaik pada data panel, yaitu:

1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model regresi data panel mana yang sebaiknya digunakan, apakah Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Pengujian ini dilakukan menggunakan program Eviews. Adapun ketentuan untuk pengujian F-Stat/Uji Chow yaitu apabila nilai probability dari Cross-section F dan Cross section Chi-square $> 0,05$ maka H_0 diterima, dan model regresi yang dipilih adalah Common Effect Model (CEM). Apabila nilai probability dari Cross-section F dan Cross-section Chi-square $< 0,05$ maka H_0 ditolak, dan model regresi yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 2
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1270.602762	(26,77)	0.0000
Cross-section Chi-square	654.897517	26	0.0000

Sumber: Data diolah dengan eviews, 2020

Pada tabel 2 merupakan hasil dari Uji Chow, yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross section Chi square yang dihasilkan adalah 0,0000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih dari 5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa model Common Effect merupakan model yang terpilih.

2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model dengan tujuan untuk menentukan model mana yang sebaiknya digunakan. Pengujian ini dilakukan menggunakan program Eviews. Adapun ketentuan untuk pengujian Hausman yaitu apabila nilai probability dari Cross-section random $> 0,05$ maka H_0 diterima model regresi yang dipilih adalah Random Effect Model (REM). Apabila nilai probability dari Cross-section random $< 0,05$ maka H_0 ditolak model regresi yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 3
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.106510	4	0.0012

Sumber: Data diolah dengan eviews, 2020

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross section random sebesar 0,0012. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih dari 5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa model Fixed Effect terpilih dalam uji hausman.

3.2. Hasil Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan kurun waktu 2017-2020 sedangkan cross section meliputi wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis data panel ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4
 Hasil Regresi Data Panel PLS, FEM, dan REM

Variabel	PLS	FEM	REM
C	-43,04595 (0,0000)	4,341856 (0,0225)	4,369642 (0,0191)
UM	1,353271 (0,0005)	-0,127699 (0,0262)	-0,124804 (0,0285)
TPT	0,179049 (0,0015)	0,011582 (0,0647)	0,012438 (0,0460)
PM	-0,011239 (0,0000)	-0,000785 (0,0903)	-0,000920 (0,0420)
G	1,152333 (0,0003)	-0,025581 (0,7560)	-0,028264 (0,7249)
R-Square	0,381195	0,998561	0,069669
Prob F-stat	0,000000	0,000000	0,111287

Sumber : Data yang di olah

Pemilihan model terbaik telah dilakukan dengan Uji Chow dan Uji Hausman, hasil analisis diketahui bahwa Fixed Effect Model merupakan model yang terpilih dalam analisis ini. Berdasarkan Tabel 4 menjelaskan bahwa koefisien dari UM sebesar -0,127699, TPT sebesar 0,011582, PM sebesar -0,000785, dan G sebesar -0,025581 dengan signifikan empirik sebesar 0,0262 (<0,05), 0,0647 (<0,10), 0,0903 (<0,10), 0,7560 (>0,10). Sehingga dalam hal ini menunjukan bahwa variabel upah minimum, tingkat pengangguran Terbuka dan Penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap indeks entropy theil. Nilai R square sebesar 0,998561 atau 99,86% dan Prob (F-statistic) sebesar 0,0000

3.3. Upah minimum dan ketimpangan pendapatan

Tabel 4 menunjukkan bahwa upah minimum mempunyai signifikansi pengaruh sebesar 0,0262 (<0,05) yang menunjukkan pengaruh yang negatif pada ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat dengan koefisien sebesar -0,127699. Hasil tersebut menyimpulkan ketika upah minimum naik 1 rupiah maka ketimpangan pendapatan akan turun sebesar 0,127699.

Selama tahun 2017 hingga 2020 upah minimum cenderung meningkat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum yang meningkat akan menurunkan ketimpangan pendapatan, karena upah minimum di beberapa daerah belum merata sehingga terjadi kesenjangan pendapatan dan pembangunan daerah yang tidak sama. Upaya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan dapat dilakukan dengan mulai meningkatkan upah sehingga dapat membuat daerah yang tertinggal menjadi maju. Ketika upah minimum suatu daerah dinaikan akan

berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat yang nantinya akan membuat kemiskinan di daerah tersebut menjadi menurun.

Istikhoroh, dkk (2020), melakukan penelitian yang menggunakan model terpilih CEM yang menjelaskan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan signifikan empirik sebesar 0,0141 yang berarti kurang dari 0,05.

3.4. Tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan

Berdasarkan hasil regresi data panel menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka mempunyai signifikan empirik sebesar 0,0647 ($<0,10$) sehingga berpengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan dengan koefisien sebesar 0,011582 yang artinya ketika tingkat pengangguran terbuka naik 1% maka ketimpangan pendapatan akan naik sebesar 0,011582.

Dalam penelitian ini tingkat pengangguran menunjukkan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan karena ketika tingkat pengangguran semakin tinggi akan menyebabkan kenaikan kemiskinan dan penurunan perekonomian di daerah tersebut. Provinsi Jawa Barat mempunyai beberapa daerah yang tergolong memiliki pengangguran terbesar yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Bogor, dan Kabupaten Kuningan. Pemerintah berupaya mengurangi pengangguran dengan adanya pemberian subsidi pendidikan serta pelatihan kerja untuk daerah-daerah yang tertinggal. Pengangguran di Jawa Barat merupakan indikator yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ketika suatu daerah memiliki tingkat pengangguran tinggi maka akan membuat daerah tersebut tertinggal. Daerah yang memiliki pengangguran tertinggi terlihat dari pendapatan daerah yang rendah dan mengakibatkan tingginya angka ketimpangan.

Aufa N & Syafri (2019), melakukan penelitian yang menggunakan model terpilih FEM yang menjelaskan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan signifikan empirik sebesar 0,0000 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

3.5. Penduduk Miskin terhadap ketimpangan pendapatan

Berdasarkan hasil regresi data panel menjelaskan bahwa variabel investasi mempunyai signifikan empirik sebesar 0,0903 ($<0,10$) yang artinya berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena dilihat dari signifikan empirik sebesar -0,000785 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika penduduk miskin naik 1 jiwa maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,000785.

Menurut badan pusat statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu yang tertinggi sebesar 7,88% dari total populasi pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor sebesar 7,69% dari total penduduk miskin yang masuk kategori miskin. Penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan karena ketika penduduk miskin naik maka data kemiskinan akan naik. Hal ini berkaitan dengan pengangguran yang semakin tinggi akan berpengaruh besar pada peningkatan jumlah penduduk miskin karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Nurlina (2020), melakukan penelitian yang menggunakan metode regresi linier berganda yang menjelaskan bahwa penduduk miskin berpengaruh signifikan dengan probabilitas 0,006 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga penduduk miskin mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

3.6. Pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan

Berdasarkan hasil regresi tersebut pengeluaran pemerintah mempunyai signifikan empirik sebesar 0,7560 ($\geq 0,10$) maka disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat dengan koefisien empirik sebesar -0,025581 yang artinya ketika pengeluaran pemerintah naik satu ribu rupiah maka ketimpangan pendapatan akan turun sebesar 0,025581. Pada kasus ini pengeluaran pemerintah tidak terdapat pengaruh walaupun pemerintah akan mengeluarkan anggaran tinggi ataupun rendah sehingga dalam hal ini pemerintah tidak bisa mengandalkan pengeluaran pemerintah untuk menurunkan ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Malindar (2020), melakukan penelitian yang menggunakan metode data panel dengan model terpilih REM yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan probabilitas sebesar 0,4526 lebih dari 0,05.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan yang di dapat sebagai berikut:

1. Perhitungan indeks entropy theil menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat sebesar 1,90 pada tahun 2017-2020 yang artinya ketimpangan pendapatan masih relatif tinggi.
2. Hasil regresi data panel dengan Uji Chow dan Uji Hausman menjelaskan bahwa model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Model FEM merupakan model yang tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel dependen dengan variabel independen. Berdasarkan uji F diketahui bahwa variabel upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat dengan R-square yang menjelaskan 99,86% dipengaruhi variabel didalam model.
3. Berdasarkan uji t hanya ada tiga variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, yaitu upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan penduduk miskin dengan signifikan empirik sebesar 0,0262 ($< 0,05$), 0,0647 ($< 0,10$) dan 0,0903 (0,10). Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2020.

Referensi

- A. Nadya & S. Syafri, "Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia". *Media Ekonomi*, vol. 27, no. 1, <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5300>, 2019.
- A. Nurpita and A. Agni Nastiti, "The Analysis of Development Disparities Inter Districts/ City in Special Region of Yogyakarta (DIY) Province 2003-2013", *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, vol. 20, no. 1, 23, 2016.
- A. Sja'fii, "Pengaruh Investasi Fisik Dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004", *Journal of Indonesian Applied Economics*, vol. 3, no. 1, pp. 1–2009, <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2009.003.01.3>, 2009.
- B. Bluestone and B. Harrison, "Growing Prosperity: The Battle for Growth with Equity in the twenty-fist century", *Univ of California Press*, 2001
- Dumairy, "Perekonomian Indonesia". Erlangga, 1996.

- D. Inayati Nuraini, L. Arsyad & R. Pradiptyo, "The corruption-income inequality trap: A study of Asian countries", *Economics*, 2018
- H. Faustino and C. Vali, "The Effects of Globalisation on OECD Income Inequality: A static and dynamic analysis", *DE Working Papers; No 12/2011/DE*, 1–23. <http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/3512>, 2011.
- Hindun, S. Ady and Hariyati, "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia", *Universitas, Pascasarjana Surabaya, Negeri Soejoto, Ady Universitas, Pascasarjana Surabaya, Negeri Universitas, Pascasarjana Surabaya, Negeri*, vol. 8, no. 3, pp. 250–265, 2019.
- Istikharoh, "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Keimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Dicatory Journal of Economic*, vol. 2, no. 1, pp. 109–125, 2020.
- J. Sodik, "Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia", *Ekonomi Pembangunan*, vol. 12, pp. 27–36, 2007.
- M. Arif and R. Agustin Wicaksana, "Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya", *URECOL 6th*, 2017.
- M. González Rivas, "The effects of trade openness on regional inequality in Mexico", *Annals of Regional Science*, vol. 41, no. 3, pp. 545–561, <https://doi.org/10.1007/s00168-006-0099-x>, 2017.
- M. Hidayat, R. Darwin and M. Fikry Hadi, "Inequality of Interregional Development in Riau Indonesia; Panel Data Regression Approach", *International Journal of Economics and Financial Issues*, vol. 8, no. 5, pp. 184–189. <http://econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/6919>, 2018.
- N. Ningtiyas and I. Nuraini Dwiputri, "Analisis disparitas pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019: analisis regresi data panel" *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, vol. 1, no. 7, pp. 670–685, <https://doi.org/10.17977/um066v1i72021p670-685>, 2021.
- Nurlina, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Distribusi Pendapatan di Aceh", *Jurnal Samudra Ekonomika*, vol. 4, no. 1, pp. 91-100, 2020.
- P. Todaro Michael and S. Smith, "Pembangunan Ekonomi (11 jilid 1)", *Erlangga*, 2011.
- R. Juliana and A. Soelistyo, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, PAD, IPM, dan UMK terhadap Ketimpangan di Provinsi Banten", *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, vol. 3, no. 2, pp. 293–300. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/8232>, 2019.
- Rosa, Y. Del, and I. Sovita, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. *Menara Ekonomi*, vol. 2, no. 4, pp. 41–52, 2016.
- S. Li, F. Wang and Z. Xu, "The Trend of Regional Income Disparity in China", *Territorial Cohesion for Development Working Group, June*, vol. 20, 2016.
- S. Litwin Benjamin, "Determining the effect of the minimum wage on income inequality", *Student Publications*, vol. 300, pp. 1–22. https://cupola.gettysburg.edu/student_scholarshiphttps://cupola.gettysburg.edu/student_scholarship/300https://cupola.gettysburg.edu/student_scholarship/300, 2015.
- S. Nurmalisa Sungkar, Nazamuddin and M. Nasir, "Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, vol. 3, no. 2, pp. 40–53, 2015.
- Sjafrizal, "Ekonomi Regional". *Baduose Media*, 2008.
- Sultan, and J. Sodik, "Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional Di DIY-Jawa Tengah Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Periode (2000-2004)", *Buletin Ekonomi*, vol. 8, no. 1, pp. 1–70, 2010.
- Sutarno and M. Kuncoro, "Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, 1993-2000", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 8, no. 2, pp. 97–110, 2003.
- W. Thimas Volscho, "Minimum Wages and Income Inequality in the American States, 1960-2000", *Research in Social Stratification and Mobility*, vol. 23, no. 05, pp. 343–368, [https://doi.org/10.1016/S0276-5624\(05\)23011-1](https://doi.org/10.1016/S0276-5624(05)23011-1), 2005.
- Y. Yang and T. Greaney, "Economic growth and income inequality in the Asia-Pacific region: A comparative study of China, Japan, South Korea, and the United States", *Journal of Asian Economics*, vol. 48, pp. 6–22, <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2016.10.008>, 2016.

